

Implementasi Kebijakan

Sarah S. N. Tombokan¹, Yustina Runtuwene², Siti Khodijah Mokoagow³, Tharizza Hapsari Tatengkeng⁴, Thesya Susan Wales⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Manado, Indonesia

E-mail: sarahtombokan@unima.ac.id¹, sesiliaruntuwene03@gmail.com², sitikhodijam@gmail.com³, tharizzahapsaritatengkeng@gmail.com⁴, thesyawales2004@gmail.com⁵

Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 13 Februari 2026

Keywords: Implementasi
Kebijakan, Kebijakan
Pendidikan, Strategi
Implementasi Kebijakan

Abstract: Implementasi kebijakan berfungsi sebagai penentu arah demi terealisasinya tujuan yang telah dirancang. Studi ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi pustaka (*library research*) untuk menguraikan proses implementasi kebijakan, khususnya di sektor pendidikan. Melalui teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai literatur dan buku relevan, ditemukan bahwa implementasi merupakan elemen paling krusial dalam sebuah kebijakan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan administratif sebagai pelaksana program, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang berdampak pada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada penerapan strategi dan pendekatan yang tepat, serta terpenuhinya segala kelengkapan sumber daya yang dibutuhkan.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah upaya menetapkan arah agar tujuan yang telah dicita-citakan dapat terealisasi secara nyata. Tahapan ini merupakan muara dari proses panjang pembuatan kebijakan dan dianggap sebagai penentu paling krusial, bahkan lebih penting daripada tahap formulasi itu sendiri. Bagus apapun rumusan kebijakan yang dibuat, ia tidak akan memiliki makna jika berhenti di atas kertas tanpa tindak lanjut. Sebaliknya, kebijakan yang sederhana sekalipun akan memberikan nilai manfaat yang besar apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di lapangan.

Kajian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi pustaka (*library research*) untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai proses implementasi tersebut, khususnya dalam konteks pendidikan. Data yang dihimpun bersumber dari literatur dan buku-buku relevan yang kemudian diolah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Fokus utama kajian ini adalah memahami bagaimana perilaku badan administratif serta faktor-faktor eksternal memengaruhi jalannya sebuah program.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses kompleks yang tidak berdiri sendiri. Ia sangat berkaitan dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab utama, serta dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Demi mewujudkan keberhasilan implementasi, diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat, serta pemenuhan berbagai kelengkapan sumber daya. Sekolah, sebagai garda terdepan, juga dituntut merancang strategi inovatif agar pendidikan dapat

memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar.

Secara teoritis, Hasbullah (2015) dan Dunn memvisualisasikan pembuatan kebijakan sebagai proses politik yang terdiri dari rangkaian tahapan yang saling bergantung secara kronologis. Fase ini dimulai dengan penyusunan agenda di mana masalah dimasukkan ke ranah publik, dilanjutkan dengan formulasi kebijakan untuk merancang alternatif solusi, dan diteruskan ke tahap adopsi kebijakan yang melibatkan dukungan legislatif atau konsensus kelembagaan.

Setelah adopsi tercapai, proses memasuki fase implementasi di mana unit-unit administrasi memobilisasi sumber daya

manusia dan finansial untuk mengeksekusi program. Rangkaian ini kemudian ditutup dengan tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Pada tahap akhir ini, unit pemeriksa memastikan apakah badan eksekutif dan legislatif telah memenuhi persyaratan undang-undang dan apakah tujuan awal kebijakan tersebut telah tercapai dengan efektif.

Meskipun demikian, urutan dan isi tahapan proses kebijakan ini bersifat dinamis dan tidak kaku, bergantung pada perspektif teori dan kondisi lingkungan yang dihadapi (Hasbullah, 2019). Hal ini dipertegas oleh Anderson (2017) yang membagi pendekatan kebijakan ke dalam beberapa teori utama, seperti teori rasional-komprehensif yang menuntut kajian masalah secara menyeluruh, serta teori inkremental yang lebih berfokus pada perbandingan terbatas tanpa merombak kebijakan secara total.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Sebagaimana dijelaskan oleh Hadi (2019), metode ini menempatkan buku-buku serta berbagai literatur ilmiah lainnya sebagai objek kajian yang utama. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dasar-dasar teoretis secara mendalam tanpa harus terjun langsung ke lapangan fisik.

Dalam proses pengumpulan data, fokus utama diarahkan pada penelusuran data kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber referensi yang digali didominasi oleh buku-buku yang secara spesifik membahas mengenai “implementasi kebijakan pendidikan”. Data-data mentah yang telah berhasil dihimpun kemudian melalui tahapan seleksi ketat, disajikan, dan diolah sedemikian rupa agar menghasilkan paparan yang ringkas, padat, serta sistematis.

Adapun teknik pengolahan data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis isi (*content analysis*). Merujuk pada definisi Muhadjir (2018), teknik ini merupakan bentuk analisis ilmiah terhadap muatan atau isi pesan yang terkandung dalam suatu data. Melalui metode ini, peneliti dapat membedah makna di balik teks literatur untuk menarik kesimpulan yang valid dan objektif mengenai implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Memahami konsep implementasi secara mendalam merupakan langkah fundamental dalam memahami kebijakan secara komprehensif. Khususnya dalam bidang pendidikan, realisasi kebijakan sering kali menghadirkan tantangan yang jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan proses perumusannya sendiri. Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sementara itu, Kamus Webster memberikan makna yang lebih spesifik, yakni menyediakan sarana (*to provide the means*) untuk memberikan dampak praktis. Wahab (2021) mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa implementasi tidak dapat berjalan tanpa dukungan sarana yang memadai untuk menghasilkan

akibat atau dampak yang diinginkan.

Lebih jauh lagi, implementasi kebijakan publik bukan sekadar aktivitas birokrasi yang dilakukan oleh badan-badan administratif semata. Proses ini melibatkan interaksi dinamis antara kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perilaku para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tahap ini sering dianggap jauh lebih krusial daripada tahap pembuatan kebijakan itu sendiri. Tanpa implementasi yang arif, situasional, dan berwawasan pemberdayaan, sebuah kebijakan hanyalah sekadar rencana indah yang tersimpan rapi dalam arsip tanpa memberikan manfaat nyata.

Sebagai sebuah proses yang dinamis, implementasi merupakan wujud tindakan pemerintah dalam merespons masalah yang timbul di masyarakat melalui keputusan-keputusan strategis. Pelaksana kebijakan melakukan serangkaian aktivitas untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Awang (2022) menggambarkan hal ini sebagai siklus yang berkelanjutan di mana kebijakan dirumuskan, diterapkan, dilaksanakan, hingga akhirnya dievaluasi melalui berbagai tahapan sistematis.

Dalam pelaksanaannya, para ahli sering menggunakan pendekatan metodologis tertentu, seperti perspektif hierarkis dan granular (Wibawa, 2019; Feis Imronah, 2019). Metodologi hierarkis bekerja dengan cara menerjemahkan strategi berskala besar menjadi kegiatan-kegiatan konkret atau miniatur aksi yang lebih kecil. Sebaliknya, perspektif granular merupakan pendekatan *bottom-up* yang bertumpu pada interaksi di tingkat lokal. Pendekatan ini mengakomodasi aspirasi dari lapisan masyarakat bawah sebagai landasan atau dukungan utama dalam pelaksanaan kebijakan.

Pembahasan

Berikut adalah hasil parafrase yang dikembangkan menjadi 6 paragraf secara terperinci dan sistematis:

Berdasarkan hasil penelitian, mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah perkara mudah, terutama ketika dihadapkan pada upaya mencapai tujuan bersama. Menciptakan formulasi kebijakan publik yang ideal dan berkeadilan memang memiliki kesulitannya tersendiri, namun mengeksekusinya dengan cara yang mampu memuaskan seluruh pihak—termasuk kelompok sasaran—merupakan tantangan yang jauh lebih berat. Kesulitan dalam mengakomodasi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan sering kali memicu gesekan yang mempertegas nuansa politik sebagai sebuah konflik.

Dalam mengurai kompleksitas tersebut, terdapat berbagai aspek fundamental yang perlu diperhatikan, mulai dari teori, model, langkah-langkah strategis, hingga tantangan yang dihadapi. Berkaitan dengan metode pelaksanaan di lapangan, Hasbullah (2015) mengklasifikasikan empat pendekatan utama yang dapat diadopsi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. Klasifikasi ini membantu memetakan strategi yang paling relevan dengan kondisi organisasi dan lingkungan kebijakan.

Pendekatan pertama adalah pendekatan struktural. Metode ini bersifat *top-down* atau dari atas ke bawah, yang memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang dan dievaluasi dalam kerangka hierarki yang ketat. Penekanannya terletak pada garis komando dan supervisi yang jelas antar-tingkatan organisasi. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan diterapkan pada situasi yang membutuhkan organisasi pelaksana bertingkat dengan dinamika perubahan kebijakan yang tinggi.

Pendekatan kedua, yaitu pendekatan prosedural dan manajerial, hadir sebagai penyempurna untuk mengatasi kekakuan atau kelemahan pada pendekatan struktural. Fokus utama dari

pendekatan ini bukan lagi sekadar pada hierarki, melainkan pada pengembangan sistem kerja. Hal ini mencakup penyusunan proses teknis, prosedur operasional, serta penerapan teknik manajemen yang relevan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih tertib dan terukur.

Selanjutnya, terdapat pendekatan perilaku yang menempatkan manusia sebagai faktor determinan utama. Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya yang berorientasi pada sistem dan organisasi, pendekatan ini berasumsi bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sikap dan perilaku para pelaksananya. Oleh karena itu, upaya memengaruhi perilaku manusia dan membangun orientasi yang positif menjadi kunci agar proses implementasi dapat berlangsung dengan baik.

Terakhir adalah pendekatan politik. Pendekatan ini menyoroti faktor kekuasaan sebagai elemen vital yang mampu memperlancar atau justru menghambat jalannya kebijakan. Dalam perspektif ini, implementasi selalu mempertimbangkan dinamika antara kelompok pendukung dan kelompok penentang. Pemetaan kekuatan politik ini diperlukan untuk mengelola potensi konflik dan memastikan kebijakan mendapatkan dukungan yang memadai untuk dapat bertahan dan berhasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian studi pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan paling krusial dan menentukan dalam siklus kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebagus apa pun formulasi kebijakan yang dirancang, nilai manfaatnya hanya akan terwujud melalui proses eksekusi yang nyata. Implementasi bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan proses politik dan sosial yang kompleks, dinamis, dan rentan terhadap konflik kepentingan.

Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih strategi pelaksanaan. Sebagaimana temuan penelitian, terdapat empat pendekatan utama yang dapat disinergikan, yaitu pendekatan struktural yang menekankan hierarki, pendekatan prosedural yang berfokus pada manajemen teknis, pendekatan perilaku yang menyoroti aspek manusia, serta pendekatan politik untuk mengelola dinamika kekuasaan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh kemampuan mengkomodasi keempat pendekatan tersebut dalam menghadapi realitas di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, J. A. (2017). *Public policy making*. Holt, Rinehart & Winston.
- Awang, A. (2022). *Implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2016). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi kedua). Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. (2019). *Statistik II*. PT Rineka Cipta.
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan pendidikan dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Muhadjir, N. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Rajawali Pers.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik: Proses dan analisis*. Intermedia.
- Winarno, B. (2019). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).